

KARAKTERISTIK DEMOGRAFI, SOSIAL DAN EKONOMI SUMBER DAYA PEMUDA INDONESIA

*Kasto**

Abstract

The productivity of youth must be increased in the development process of Indonesia. According to the 1990 population census, there are 50.7 million youths (people at the age between 15-29 years). Out of that number, only 52.1 percent who have directly participated in the development process, because their main activities are working. Of the rest, 20.6 percent took care of houses; 17.1 percent studied; 3.6 percent were looking for a job, and 6.6 percent were included in the non productive group. Out of 52.1 percent or 26.4 million youth who worked, 33.4 percent worked below the normal working hours (less than 35 hours per week). Based on the field of work, 52.8 percent worked in the agricultural sector. According to the type of job, 91.2 percent worked as rough or unskilled workers, and based on the work status, 65.1 percent worked in the informal sectors. These numbers reflect on the low quality of Indonesia's youth labor force, and this must be immediately removed, mainly through education, remembering that 61.6 percent of youths have no more than primary education.

Pendahuluan

Pemuda adalah aset nasional yang memerlukan penanganan secara baik dan hati-hati karena di tangan pemudalah pembangunan diharapkan akan diteruskan. Keberhasilan pembangunan pada masa mendatang antara lain ditentukan oleh kondisi atau kualitas sumber daya pemuda saat ini. Kualitas ini antara lain dapat diketahui

dari hasil Sensus Penduduk 1990. Pemuda yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penduduk usia 15-29 tahun.

Di samping aspek kuantitatif yang pertumbuhannya cepat, kondisi kependudukan pada masa mendatang juga ditentukan oleh aspek kualitatif. Pengetahuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ini -khususnya

* Prof. Drs. Kasto, M.A. adalah staf peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar pada Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

kelompok usia muda atau pemuda-penting, mengingat kelompok ini sangat potensial. Tulisan ini mengungkapkan kualitas sumber daya pemuda di Indonesia, dilihat dari aspek demografi, sosial, dan ekonomi.

Sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi adalah tiga faktor pembangunan yang pokok. Penemuan para ahli menunjukkan bahwa peranan sumber daya manusia terhadap pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi amatlah besar karena tanpa upaya pengembangan kualitas manusia, suatu negara tidak akan mampu mencapai tingkat perkembangan setinggi yang dicapai oleh negara-negara maju sekarang ini. Schultz (1962) dalam Effendi (1991) seorang sarjana ekonomi sumber daya manusia dari Amerika Serikat misalnya, menyimpulkan "Suatu peringkat pertumbuhan ekonomi mungkin saja dicapai dengan peningkatan modal konvensional, walaupun tenaga kerja yang tersedia mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang rendah, tetapi tingkat pertumbuhan yang dicapai amat terbatas. Tidak mungkin suatu negara akan mengenyam hasil pertanian modern atau kemajuan industri modern yang pesat tanpa melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan sumber daya manusianya".

Sumber daya manusia merupakan faktor yang amat penting dalam pembangunan ekonomi di Jepang dan Eropa Barat, yang mengalami kehancuran total pada Perang Dunia II, terutama disebabkan negara-negara

tersebut telah memiliki sumber daya manusia yang memadai. "Keajaiban Korea" (*Korean Miracle*) dan "Keajaiban Taiwan" (*Taiwan Miracle*) dipandang sebagai *human resource based* karena pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan lebih dahulu daripada pembangunan ekonomi (Gold, 1988). Psacharopoulos dan Hinchcliffe (1980), misalnya, memperkirakan bahwa modal pendidikan di Korea Selatan dan Taiwan mencapai 40 persen dari modal ekonomi nasional, 44 persen di Amerika Serikat, 29 persen di Inggris, dan hanya 6 sampai 17 persen di negara-negara Asia dan Afrika. Pencapaian pembangunan sosial yang lebih baik oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibandingkan dengan propinsi lainnya, diukur dari tingkat kematian bayi yang lebih rendah daripada rerata nasional, harapan hidup yang lebih tinggi, status gizi yang lebih baik, dan urutan ketiga pada PDRB per kapita, menurut Mubyarto (1988) adalah karena pembangunan di DIY lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia (dalam Effendi, 1990).

Menurut teori *human capital*, kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Meskipun kesehatan telah mendapat perhatian dalam dekade belakangan ini, di banyak negara sedang berkembang seperti Indonesia, salah satu strategi yang telah lama diterapkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah meningkatkan pendidikan. Pendidikan dipandang

tidak hanya dapat menambah pengetahuan, tetapi dapat juga meningkatkan keterampilan (keahlian) tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan penduduk (Effendi, 1992).

Keadaan Demografi Pemuda

- Jumlah dan Pertumbuhan

Sejalan dengan jumlah penduduk yang selalu bertambah, jumlah pemuda

juga bertambah. Menurut hasil Sensus Penduduk 1980 dari jumlah 147,5 juta sebanyak 39,6 juta atau 27 persen di antaranya adalah pemuda. Sepuluh tahun kemudian, pada Sensus Penduduk 1990 jumlah penduduk bertambah menjadi 179,2 juta, sebanyak 50,7 juta atau 28,3 persen adalah pemuda (Tabel 1). Selama 1980-1990 laju pertumbuhan pemuda sebesar 2,49 persen per tahun, lebih tinggi daripada laju pertumbuhan

Tabel 1.
Jumlah Penduduk, Jumlah Pemuda, dan Laju Pertumbuhan

Propinsi	Pddk (x1980)		Pemuda (x1000)		Pertumbuhan 1980-1996 (%/th)	
	1980	1980	1980	1990	Penduduk	Pemuda
DI Aceh	2611	3416	697	963	2,72	3,29
Sumatra Utara	8391	16252	2286	2808	2,05	2,29
Sumatra Barat	3406	4000	683	1054	1,62	1,79
Riau	2164	3279	626	914	43,0	3,88
Jambi	1444	2018	488	664	34,0	3,65
Sumatra Selatan	4828	6312	1290	1723	3,15	2,34
Bangkulu	788	1179	203	334	4,38	5,11
Lampung	4824	6016	1245	1698	2,67	3,15
DKI Jakarta	6481	8228	2170	2971	2,42	3,19
Jawa Barat	27460	35382	7208	8683	2,57	1,88
Jawa Tengah	23367	28816	6649	7611	1,18	1,88
DIY	2750	2913	761	345	0,57	1,05
Jawe Timur	29169	32488	7893	9171	1,88	1,51
Bali	2470	2777	652	839	1,18	2,55
NTB	2724	3369	688	660	2,15	2,71
NTT	2737	3268	723	683	1,79	1,79
Timor Timur	555	748	-	212	3,03	-
Kalimantan Barat	2435	3228	683	675	2,65	2,51
Kalimantan Tengah	934	1396	234	401	3,88	4,67
Kalimantan Selatan	2063	2597	655	771	2,32	3,34
Kalimantan Timur	1215	1875	361	574	4,42	4,75
Sulawesi Utara	2115	2477	603	761	16,0	2,35
Sulawesi Tengah	1285	1703	381	492	2,87	3,43
Sulawesi Selatan	6059	5980	1495	1948	1,42	2,60
Sulawesi Tenggara	942	1349	238	385	3,88	4,11
Maluku	1465	1853	392	514	2,79	2,75
Irian Jaya	1107	1630	323	465	3,45	3,71
Indonesia	147490	179248	39628	50679	1,97	2,49

Sumber: BPS 1983 dan 1992.

penduduk 1,97 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk maupun pemuda yang paling tinggi dijumpai di Bengkulu, berturut-turut 4,38 persen dan 5,11 persen per tahun; sedang yang paling rendah dijumpai di Yogyakarta, berturut-turut 0,57 persen dan 1,05 persen per tahun. Pada umumnya laju pertumbuhan pemuda lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk. Hanya beberapa propinsi menunjukkan laju pertumbuhan pemuda lebih

rendah daripada pertumbuhan penduduk. Perbedaan laju pertumbuhan pemuda terutama dipengaruhi oleh kematian dan migrasi.

- Status Perkawinan

Berdasarkan status perkawinan pada tahun 1990 secara nasional sebanyak 68,8 persen pemuda laki-laki Indonesia berstatus belum kawin; 30,2 persen berstatus kawin, dan sisanya 1 persen berstatus cerai dan duda (Tabel

Tabel 2.
Persentase Pemuda Laki-Laki menurut Status Perkawinan 1990

Propinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai	Duda	Jumlah	N
DI Aceh	77,9	21,7	0,3	0,1	100	466761
Sumatra Utara	72,8	28,7	0,4	0,1	100	1385681
Sumatra Barat	75,2	23,0	0,8	0,1	100	500309
Riau	72,1	27,1	0,5	0,2	100	444649
Jambi	85,3	33,8	0,7	0,2	100	280636
Sumatra Selatan	87,7	31,4	0,7	0,2	100	841380
Bengkulu	88,0	33,1	0,7	0,2	100	166432
Lampung	87,4	31,8	0,5	0,2	100	843522
DKI Jakarta	78,2	24,1	0,3	0,8	100	1419130
Jawa Barat	68,0	35,3	1,5	0,1	100	4847270
Jawa Tengah	68,4	30,8	0,7	0,1	100	3696055
DIY	84,8	15,2	0,2	0,0	100	227124
Jawa Timur	57,8	31,2	0,9	0,1	100	4406142
Bali	71,8	27,8	0,4	0,2	100	413149
NTB	68,5	34,8	1,8	0,3	100	394948
NTT	78,7	22,8	0,2	0,3	100	412680
Timor Timur	72,7	28,5	0,3	0,5	100	108975
Kalimantan Barat	68,3	30,8	0,8	0,2	100	431945
Kalimantan Tengah	55,7	33,3	0,7	0,3	100	198222
Kalimantan Selatan	68,8	30,2	1,1	0,2	100	371003
Kalimantan Timur	71,9	27,3	0,8	0,2	100	289774
Sulawesi Utara	71,2	28,2	0,5	0,2	100	382900
Sulawesi Tengah	87,9	11,0	0,2	0,8	100	667340
Sulawesi Selatan	73,8	25,3	0,8	0,2	100	924453
Sulawesi Tenggara	59,4	29,7	0,8	0,2	100	172037
Maluku	89,4	29,8	0,7	0,3	100	250478
Irian Jaya	68,2	33,8	0,5	0,5	100	230823
Indonesia	68,8	30,2	0,9	0,1	100	24773818

Sumber: BPS, 1992.

2). Persentase ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun yang sama sebanyak 44,6 persen pemuda perempuan (pemudi) Indonesia belum kawin; 52,3 persen berstatus kawin, dan 3,1 persen berstatus cerai dan janda (Tabel 3). Dari persentase yang belum kawin, laki-laki 68,8 persen dan perempuan 44,6 persen, menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin pertama perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini mungkin menyebabkan perceraian

yang tidak diikuti proses kawin pada perempuan, terlihat dari persentase perempuan yang berstatus cerai dan janda (3,1 persen) lebih besar daripada laki-laki yang hanya 1 persen.

Untuk laki-laki persentase yang belum kawin terbesar dijumpai di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 84,6 persen dan Sulawesi Tengah 87,9 persen; sedang yang terendah 63 persen dijumpai di Jawa Barat. Untuk perempuan persentase belum kawin yang terbesar juga di Daerah Istimewa

Tabel 3.
Persentase Pemuda Perempuan menurut Status Perikawinan 1992

Propinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai	Janda	Jumlah	N
DI Aceh	52,4	45,8	1,3	0,5	100	496496
Sumatra Utara	50,8	41,6	1,2	0,4	100	1482536
Sumatra Barat	55,8	41,6	2,0	0,4	100	553897
Riau	47,1	50,8	1,7	0,4	100	469599
Jambi	38,7	50,6	2,2	0,5	100	303251
Sumatra Selatan	46,4	52,5	1,6	0,5	100	631865
Bengkulu	46,7	57,2	1,7	0,4	100	167399
Lampung	46,0	57,9	1,7	0,4	100	854615
DKI Jakarta	50,7	39,1	1,6	0,4	100	1542184
Jawa Barat	33,9	39,6	4,1	0,4	100	5102442
Jawa Tengah	42,4	84,8	2,3	0,4	100	3196435
DIY	63,8	29,3	0,6	0,1	100	216100
Jawa Timur	39,9	50,5	3,1	0,5	100	4764818
Bali	54,5	44,4	0,9	0,2	100	428411
NTB	42,8	51,9	4,7	0,6	100	464750
NTT	50,6	33,9	1,9	0,6	100	450317
Timor Timur	50,4	47,3	1,3	1,0	100	103211
Kalimantan Barat	44,6	63,2	1,6	0,5	100	443532
Kalimantan Tengah	39,4	63,6	1,9	0,5	100	202765
Kalimantan Selatan	43,9	52,6	3,0	0,5	100	399518
Kalimantan Timur	46,5	84,4	1,6	0,4	100	284000
Sulawesi Utara	63,4	45,0	1,3	0,4	100	378307
Sulawesi Tengah	46,9	52,0	1,6	0,5	100	248072
Sulawesi Selatan	57,3	46,1	2,0	0,6	100	102526
Sulawesi Tenggara	46,6	51,0	2,0	0,4	100	184100
Maluku	51,1	46,3	2,0	0,6	100	263950
Irian Jaya	33,9	63,7	1,4	1,0	100	234299
Indonesia	44,6	52,3	2,6	0,5	100	25199551

Sumber: BPS, 1992.

Yogyakarta yaitu 69,8 persen, kemudian disusul NTT 58,6 persen, sedang yang terendah juga dijumpai di Jawa Barat 35,9 persen, dan Irian Jaya 33,9 persen. Dari pelbagai studi fertilitas terbukti bahwa usia kawin di Jawa Barat termasuk rendah dan di DIY termasuk tinggi. Faktor-faktor sosial budaya berpengaruh terhadap perbedaan usia kawin.

Apabila diperhatikan kelompok yang cerai, untuk laki-laki paling tinggi dijumpai di Jawa Barat yaitu 1,6 persen dan Kalimantan Selatan 1,1 persen dan paling rendah 0,2 persen dijumpai di NTT dan Sulawesi Tengah. Untuk perempuan paling tinggi juga dijumpai di Jawa Barat yaitu 4,1 persen dan NTB 4,7 persen, dan paling rendah dijumpai di DIY sebesar 0,8 persen.

- Fertilitas

Tabel 4 memperlihatkan rata-rata anak lahir hidup dari perempuan berumur 15-29 tahun. Semakin tua usia ibu, semakin besar jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup.

Sampai dengan usia 25-29 tahun di Sumatra, propinsi-propinsi dengan fertilitas tinggi dijumpai di Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung dengan rata-rata anak lahir hidup 2,3 per wanita. Di Jawa dijumpai di Jawa Barat dengan rata-rata anak lahir hidup 2,1 per wanita; di Nusa Tenggara dijumpai di NTB dengan rata-rata anak lahir hidup 2,3 per wanita; Kalimantan di Kalimantan Barat 2,3 per wanita; Sulawesi di Sulawesi Tenggara 2,5 per wanita, serta di Maluku dan Irian Jaya masing-masing 2,1 per wanita. Apabila angka-angka anak lahir hidup ini

dikaitkan dengan angka TFR (Total Fertility Rate), ternyata ada konsistensi antara rata-rata anak lahir hidup wanita usia 25-29 dengan angka TFR; artinya angka yang tinggi pada rata-rata anak lahir hidup wanita usia 25-29 juga diikuti oleh angka TFR yang tinggi. Ini berarti bahwa tingkat fertilitas secara keseluruhan lebih ditentukan oleh tingkat fertilitas wanita usia 25-29 tahun. Apabila TFR dimasukkan sebagai salah satu indikator kualitas penduduk, TFR yang tinggi kurang menguntungkan.

Propinsi-propinsi yang memperlihatkan fertilitas rendah, baik dilihat dari rata-rata anak lahir hidup dari wanita usia 25-29 tahun maupun dari TFR meliputi tiga propinsi di Jawa, yaitu DKI Jakarta, DIY, dan Jawa Timur, dan dua propinsi di luar Jawa, yaitu Bali dan Sulawesi Utara.

- Tingkat Pendidikan

Sumber daya alam yang melimpah hanya akan merupakan modal pembangunan yang statis apabila tidak dikelola secara optimal oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berketerampilan tinggi. Untuk itu, pemerintah sudah selayaknya memperhatikan sektor pendidikan. Perhatian yang telah diberikan antara lain Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 tahun yang kemudian menjadi 9 tahun, menambah gedung-gedung sekolah, menugaskan guru-guru di daerah terpencil, dan sebagainya. Diharapkan dengan usaha-usaha ini tingkat pendidikan pemuda meningkat dengan cepat.

Tabel 4.
Rata-Rata Anak yang Pernah Dilahirkan per Wanita
menurut Propinsi dan Kelompok Umur serta TFR 1990

Propinsi	Kelompok Umur ¹⁾			TFR ²⁾ (per wanita)
	15-19	20-24	25-29	
DI Aceh	0,98	0,81	2,18	4,37
Sumatra Utara	0,06	0,68	2,18	4,29
Sumatra Barat	0,06	0,55	2,06	3,80
Riau	0,09	0,63	2,19	4,09
Jambi	0,14	0,97	2,26	3,76
Sumatra Selatan	0,11	0,84	2,32	4,32
Bengkulu	0,10	1,01	2,33	3,97
Lampung	0,11	0,97	2,32	4,06
DKI Jakarta	0,06	0,50	1,46	2,33
Jawa Barat	0,15	0,95	2,14	3,47
Jawa Tengah	0,09	0,81	1,68	3,06
DIY	0,03	0,46	1,32	2,06
Jawa Timur	0,10	0,75	1,68	2,46
Bali	0,06	0,63	1,55	2,28
NTB	0,09	0,98	2,32	4,98
NTT	0,09	0,63	0,78	4,61
Timor Timur	0,09	0,80	2,11	5,73
Kalimantan Barat	0,12	0,99	2,80	4,44
Kalimantan Tengah	0,13	1,09	2,21	4,03
Kalimantan Selatan	0,11	0,82	1,97	3,24
Kalimantan Timur	0,09	0,80	1,95	3,28
Sulawesi Utara	0,09	0,59	1,84	2,59
Sulawesi Tengah	0,13	0,96	2,18	3,80
Sulawesi Selatan	0,07	0,65	1,78	3,84
Sulawesi Tenggara	0,09	0,99	2,49	4,91
Maluku	0,09	0,84	2,05	4,59
Irian Jaya	0,17	0,97	2,09	4,70
Indonesia	0,10	0,80	1,94	3,33

Sumber: 1) BPS, 1992
2) Sukamdi, 1992.

Salah satu ukuran tingkat pendidikan pemuda adalah tingkat buta huruf atau kepandaian membaca dan menulis. Buta huruf merupakan faktor penghambat pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak awal Orde Baru telah menempatkan program penurunan angka buta huruf ini dalam prioritas utama di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1990 tingkat buta huruf pemuda mencapai 5,5 persen, bervariasi dari 39,1 persen di Timor Timur, 23,8 persen di Irian Jaya, dan 17,5 persen di Nusa Tenggara Barat, sampai yang terkecil 0,3 persen di DKI Jakarta (Tabel 5). Beberapa propinsi yang juga menunjukkan angka relatif rendah (di bawah 3 persen), adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat,

Tabel 5.
 Persentase Pemuda menurut Kepandaian Membaca dan Menulis, 1990

Propinsi	Dapat baca-tulis		Buta huruf	Jumlah
	Latin	lainnya		
DI Aceh	95,0	0,7	4,3	100
Sumatra Utara	97,3	0,1	2,6	100
Sumatra Barat	96,9	0,3	2,8	100
Riau	94,9	0,5	4,6	100
Jambi	94,3	1,1	4,6	100
Sumatra Selatan	96,5	0,2	3,3	100
Bengkulu	95,4	0,3	4,3	100
Lampung	96,6	0,3	3,1	100
DKI Jakarta	98,6	0,1	0,3	100
Jawa Barat	95,2	0,5	4,3	100
Jawa Tengah	94,7	0,3	4,9	100
DIY	96,8	0,2	3,0	100
Jawa Timur	88,4	1,6	10,0	100
Bali	91,5	0,2	6,3	100
NTB	61,6	0,9	17,5	100
NTT	91,1	0,2	6,7	100
Timor Timur	00,1	0,6	39,1	100
Kalimantan Barat	90,3	1,0	6,7	100
Kalimantan Tengah	95,2	0,6	4,2	100
Kalimantan Selatan	95,5	0,7	3,9	100
Kalimantan Timur	95,6	0,4	4,0	100
Sulawesi Utara	97,5	0,2	2,3	100
Sulawesi Tengah	95,0	0,2	2,3	100
Sulawesi Selatan	69,9	0,9	9,2	100
Sulawesi Tenggara	92,6	0,5	6,6	100
Maluku	97,0	0,2	2,6	100
Irian Jaya	75,7	0,4	23,6	100
Indonesia	93,9	0,6	5,5	100

Sumber: BPS, 1992.

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. DIY, dengan predikat kota pelajar, ternyata 3 persen dari pemudanya masih buta huruf. Angka ini untuk Jawa Timur jauh lebih besar, mencapai 10 persen.

Selain berdasarkan tingkat melek huruf atau buta huruf, kondisi pendidikan pemuda dapat digambarkan pula melalui pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Seperti terlihat pada

Tabel 6, secara nasional pada tahun 1990 masih sebanyak 24,2 persen pemuda Indonesia termasuk tidak sekolah dan tidak atau belum tamat SD. Kelompok yang tamat SD mencapai 37,4 persen. Apabila kedua persentase tersebut disatukan, sebanyak 61,6 persen pemuda Indonesia berpendidikan SD ke bawah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin kecil persentase pemudanya. Ini berarti

Tabel 6.
 Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1990

Propinsi	Tidak Sekolah	Tdk/Bim tmt SD	SD	SLTP	SLTA	AK.	Jumlah
DI Aceh	4,1	15,4	32,9	26,5	19,3	1,8	100
Sumatra Utara	2,4	15,6	32,2	28,0	20,1	1,7	100
Sumatra Barat	2,1	18,6	29,3	26,3	21,1	2,4	100
Riau	4,6	21,7	33,9	21,7	18,8	1,3	100
Jambi	5,1	23,8	34,2	20,2	15,3	1,4	100
Sumatra Selatan	3,1	25,0	35,6	20,4	14,8	1,1	100
Bengkulu	3,6	22,1	33,7	21,8	17,3	1,7	100
Lampung	3,1	26,0	37,3	19,7	12,9	1,0	100
DKI Jakarta	1,7	9,0	27,1	27,3	30,8	4,1	100
Jawa Barat	4,2	19,9	40,2	17,2	14,4	1,1	100
Jawa Tengah	4,4	19,5	44,0	17,8	12,9	1,3	100
DIY	2,8	9,0	27,3	28,7	31,0	3,2	100
Jawa Timur	7,8	17,3	39,5	19,4	14,7	1,6	100
Bali	6,4	11,6	32,0	22,9	2,6	2,5	100
NTB	6,3	22,6	20,4	16,8	13,6	1,3	100
NTT	7,5	27,3	40,9	13,4	10,0	0,9	100
Timor Timur	9,2	14,9	21,1	14,3	9,3	1,2	100
Kalimantan Barat	0,7	37,9	24,6	15,2	10,8	0,6	100
Kalimantan Tengah	4,0	20,6	35,9	23,2	15,2	1,1	100
Kalimantan Selatan	3,5	23,7	35,0	20,4	16,2	1,3	100
Kalimantan Timur	3,9	17,7	30,3	24,5	21,6	2,0	100
Sulawesi Utara	1,2	24,6	29,4	23,6	19,1	1,9	100
Sulawesi Tengah	3,9	19,4	40,8	20,1	14,7	1,3	100
Sulawesi Selatan	9,1	18,8	31,8	22,3	19,0	1,3	100
Sulawesi Tenggara	8,6	17,6	35,6	22,3	16,5	1,4	100
Maluku	2,8	17,8	37,4	24,2	18,5	1,4	100
Irian Jaya	23,1	19,8	26,1	18,1	13,7	1,2	100
Indonesia	5,4	18,8	37,4	20,3	16,4	1,7	100

Sumber: SPS, 1992.

bahwa kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi, karena berbagai hal, semakin rendah atau semakin kecil. Secara keseluruhan dapat disebutkan bahwa tingkat putus sekolah termasuk tinggi. Dari sebanyak 50.678.875 pemuda Indonesia usia 15-29 tahun, sebanyak 11.745.295 atau sebanyak 23,2 persen adalah kelompok putus sekolah pada berbagai tingkat pendidikan (BPS, 1993).

Ketenagakerjaan

- Jenis Kegiatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Pengangguran

Dari seluruh pemuda usia 15-29 tahun, sebanyak lebih dari 28 juta atau 55,7 persen termasuk angkatan kerja dan sisanya sebanyak 44,3 persen bukan angkatan kerja, seperti terlihat pada Tabel 7. Dari tabel ini tampak bahwa kelompok pencari kerja mencapai lebih dari 1,8 juta atau 3,6 persen dari total pemuda serta

Tabel 7.
Distribusi Pemuda menurut Jenis Kegiatan Utama 1990

Jenis Kegiatan Umum	Jumlah	Persentase
1. Angkatan Kerja	28244134	55,7
a. Bekerja	26411074	52,1
b. Mencari Pekerjaan	1833110	3,6
2. Bukan Angkatan Kerja	22434691	44,3
a. Sekolah	8659383	17,1
b. Mengurus Rumah Tangga	10421850	20,6
c. Lainnya	3353488	6,6
Jumlah (1+2)	50678875	100

Sumber: BPS, 1992.

kelompok lainnya hampir 3,4 juta atau 6,6 persen. Apabila kedua kelompok ini digabungkan mencapai lebih dari sepuluh persen. Kelompok ini merupakan kelompok rawan yang lebih merupakan beban. Di samping itu, kelompok yang mengurus rumah tangga mencapai di atas 20 persen, suatu angka yang cukup besar. Angka ini lebih besar daripada kelompok yang sekolah. Padahal kelompok yang sekolah ini merupakan potensi sumber daya yang diharapkan mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Dilihat dari kelompok yang bekerja (52,1 persen), dapat dimengerti bahwa beban pemuda sebenarnya cukup berat. Rasio kelompok yang bekerja terhadap total pemuda hampir mencapai 1:2.

Analisis ketenagakerjaan ini tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam karena terbatasnya data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, khususnya mengenai pemuda (penduduk usia 15-29 tahun). Hampir semua tabel ketenagakerjaan disajikan secara keseluruhan, artinya untuk penduduk usia 10 tahun ke atas

sehingga tidak mungkin secara khusus melihat kelompok 15-29 tahun saja. Apabila dilihat dari persebaran jenis kegiatan menurut propinsi, seperti terlihat pada Tabel 8, diperoleh satu ukuran atau indikator yang penting dalam ketenagakerjaan, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka tidak lain adalah persentase angkatan kerja yang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja seluruhnya.

Konsep pengangguran terbuka didasarkan atas *labor force approach* (LFA). Sebenarnya pendekatan ini mempunyai kelemahan karena klasifikasi yang diajukan masih belum menggambarkan masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya, terutama di negara sedang berkembang.

Dalam pendekatan tersebut permasalahan ketenagakerjaan yang dapat dilihat adalah pengangguran. Beberapa ahli, Myrdal (1968) misalnya, menyatakan bahwa pengangguran terbuka tidak menggambarkan masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya di Asia. Hal tersebut

Tabel 6.
 Persentase Pemuda menurut Jenis Kegiatan 1990

Prepinsi	Angkatan Kerja		Jumlah		Bukan Angkatan Kerja			Jumlah	
	Kerja	Can Kerja	%	N	Sekelah	Urus RT	Lain	%	N
Di Aceh	94,4	5,6	100	506878	44,1	39,5	16,4	100	963257
Sumatra Utara	93,1	6,9	100	1580484	52,7	35,0	12,3	100	1307733
Sumatra Barat	92,8	7,2	100	514928	51,3	33,5	15,1	100	539378
Riau	94,5	5,5	100	495785	38,7	49,4	11,9	100	418462
Jambi	96,1	3,9	100	354328	35,9	51,2	12,9	100	249559
Sumatra Selatan	94,1	5,9	100	973957	39,9	46,4	13,7	100	749280
Bengkulu	96,4	3,6	100	201212	46,5	42,3	11,2	100	132819
Lampung	96,6	3,4	100	1001966	36,5	52,1	11,4	100	696171
DKI Jakarta	87,4	12,6	100	1553456	50,3	36,5	13,2	100	1417808
Jawa Barat	92,1	7,9	100	5163470	26,1	53,6	20,1	100	4346242
Jawa Tengah	94,4	5,6	100	4513638	37,5	47,6	14,7	100	2997852
DIY	93,4	6,6	100	473961	70,3	21,3	7,9	100	366469
Jawa Timur	94,1	5,9	100	5221132	36,6	49,2	14,2	100	3949926
Bali	96,2	3,3	100	529750	53,9	32,6	13,5	100	366810
NTB	95,9	4,1	100	518069	36,3	50,7	12,5	100	841628
NTT	96,4	1,6	100	688968	46,5	68,7	12,6	100	270011
Timor Timur	96,7	3,3	100	127710	47,2	46,9	6,9	100	84476
Kalimantan Barat	96,6	3,4	100	575410	43,4	46,6	9,3	100	300067
Kalimantan Tengah	97,0	3,0	100	242432	41,3	50,3	3,4	100	158575
Kalimantan Selatan	84,3	5,2	100	447479	68,5	23,7	7,6	100	619200
Kalimantan Timur	91,6	3,4	100	317269	39,2	49,9	10,9	100	266505
Sulawesi Utara	91,4	3,6	100	492775	39,2	44,6	16,2	100	358432
Sulawesi Tengah	84,6	5,4	100	277241	37,1	50,6	12,3	100	214551
Sulawesi Selatan	89,9	10,1	100	892543	39,6	44,9	15,3	100	1085336
Sulawesi Tenggara	92,6	7,2	100	169149	43,5	45,3	10,7	100	166994
Maluku	92,7	7,3	100	261421	44,6	49,9	14,3	100	253007
Irian Jaya	93,3	6,2	100	289854	49,9	39,6	10,5	100	175268
Indonesia	93,5	6,5	100	28244184	28,6	46,5	14,9	100	28434691

Sumber: BPS, 1992, diolah kembali.

disebabkan di negara sedang berkembang sebagian besar penduduk bekerja pada jenis pekerjaan yang tidak berlaku sistem upah atau gaji. Sementara itu, konsep pengangguran terbuka didasarkan pada sistem negara barat yang memungkinkan untuk mengukur pengangguran relatif lebih mudah. Dengan demikian, terdapat masalah ketenagakerjaan di luar "pengangguran" yang luput dari

cakupan konsep tersebut. Di samping itu, tanpa adanya tunjangan penganggur menyebabkan penduduk di negara sedang berkembang "tidak mampu" untuk menganggur (Arndt dan Sundrum, 1983). Mereka akan bekerja pada pekerjaan apa saja, meskipun dengan pendapatan yang kurang memadai. Akibatnya banyak yang bekerja dengan jam kerja panjang dan produktivitas rendah.

Menurut Arndt dan Sundrum (1983) pengangguran terbuka lebih merupakan persoalan politik daripada ekonomi. Pernyataan tersebut tampaknya perlu dikaji ulang, mengingat bahwa sebenarnya muara dari persoalan tersebut pada akhirnya adalah juga pada ekonomi. Hal ini tampak dari ketidakmampuan pembangunan ekonomi dalam menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa akses dari permasalahan tersebut pada akhirnya juga akan mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar aspek ekonomi, misalnya aspek politik.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengangguran memang belum mencerminkan masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya. Akan tetapi, tampaknya pengangguran sebagai "sebagian" dari masalah ketenagakerjaan masih perlu untuk diungkap dalam rangka melihat keseimbangan antara kesempatan kerja dan penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Di samping itu, dilihat dari pemanfaatan angkatan kerja, pengangguran merupakan angkatan kerja yang belum atau tidak dimanfaatkan sama sekali. Dengan demikian, pembahasan mengenai pengangguran akan memperjelas potensi sumber daya yang tidak dimanfaatkan.

Seperti terlihat pada Tabel 8, rata-rata tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,5 persen. Angka ini hampir dua kali tingkat pengangguran secara keseluruhan (untuk penduduk 10 tahun ke atas) yang pada tahun yang

sama, 1990, mencapai 3,2 persen (Sukamdi, 1992). Hal ini membenarkan sinyalemen yang selalu muncul bahwa sebagian besar penganggur di Indonesia adalah kelompok umur muda. Mereka ini umumnya baru tamat sekolah atau putus sekolah, yang semula termasuk bukan angkatan kerja tetapi kemudian masuk ke angkatan kerja golongan pencari kerja. Selain itu, pencari kerja ini juga mereka yang semula mengurus rumah tangga, terutama wanita yang semula sebagai ibu rumah tangga, beralih menjadi pencari nafkah.

Tabel 8 memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran di beberapa propinsi sangat tinggi (di atas 7 persen), meliputi Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Tampaknya tingkat pengangguran yang tinggi di propinsi-propinsi tersebut berkaitan dengan perkembangan kota besar maupun kota sedang yang merupakan ibu kota propinsi. Pada umumnya, pembangunan di kota-kota tersebut memacu migrasi masuk sebagai pencari kerja.

Satu-satunya propinsi yang memperlihatkan tingkat pengangguran yang sangat rendah adalah NTT, kurang dari 2 persen. Ini tidak berarti bahwa daerah ini telah terbebas dari masalah ketenagakerjaan, mengingat adanya berbagai kelemahan dari ukuran tingkat pengangguran seperti telah diuraikan sebelumnya.

Untuk kelompok bukan angkatan kerja, propinsi-propinsi yang memperlihatkan kelompok sekolah di

atas 50 persen terutama dijumpai di Sumatra Utara, Sumatra Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, dan Kalimantan Selatan. Angka tertinggi di DIY (sebesar 70,8 persen) jelas disebabkan oleh migran masuk sebagai pelajar atau mahasiswa. Kondisi ini sebenarnya kurang menguntungkan karena sebagai propinsi pencetak sumber daya manusia yang berkualitas tidak selalu dapat memanfaatkannya. Meskipun demikian, bila dilihat dari rumah pondokan dan warung makan yang semakin menjamur, kondisi ini sangat menguntungkan sebagai sumber pendapatan.

Kelompok yang mengurus rumah tangga di Propinsi Jambi, Lampung, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah menunjukkan angka di atas 50 persen. Hal ini umumnya disebabkan usia kawin pertama yang rendah, seperti terjadi di Jawa Barat maupun di NTB, sehingga struktur keluarga ikut berperan.

Keterlibatan ekonomi angkatan kerja sering diukur dengan Tingkat atau Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang tidak lain adalah persentase angkatan kerja terhadap usia kerja atau tenaga kerja. Secara teoretis semakin besar angka partisipasi angkatan kerja semakin baik.

Seperti disajikan pada Tabel 9, sebagaimana pola umum untuk penduduk usia 10 tahun ke atas, pola TPAK untuk pemuda, usia 15-29 tahun, sama yaitu TPAK di daerah kota lebih rendah daripada pedesaan. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan "membagi pekerjaan" di pedesaan, meskipun

akibatnya menurunkan produktivitas pekerja. Propinsi Jawa Barat menyimpang dari pola umum karena TPAK di kota justru lebih tinggi daripada di pedesaan. Hal ini sangat berkaitan dengan migrasi masuk ke kota dari golongan pemuda.

Secara keseluruhan (desa dan kota), terdapat 9 propinsi dengan TPAK di atas 60 persen, serta terdapat 2 propinsi dengan TPAK di bawah 50 persen. Kedua propinsi ini adalah Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi TPAK, baik faktor demografi maupun sosial ekonomi.

Dalam era pembangunan dewasa ini angka partisipasi angkatan kerja di kalangan generasi muda masih perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional sehingga dapat lebih memantapkan pembangunan yang sedang dilakukan. Kalau pembangunan ekonomi diarahkan pada tujuan utama untuk: (a) adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, dan (b) terjadinya perubahan sosial dan kelembagaan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut, tampaknya pemuda diharapkan menjadi inovator bagi pembangunan ekonomi tersebut. Dalam hal ini pemuda diharapkan berperan aktif dalam perubahan sosial, sehingga sebagai konsekuensi pemuda selalu dituntut memiliki keterampilan, intelegensi, dan diharapkan tetap berpijak pada nilai dasar yang benar. Dalam hubungan inilah sering timbul pertentangan yang mendalam dalam diri pemuda, apakah dia akan hanyut dalam arus perkembangan yang ada

Tabel 9.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda
menurut Daerah 1990

Propinsi	Kota	Desa	Kota+Desa
DI Aceh	37,9	56,0	52,5
Sumatra Utara	48,4	61,9	54,4
Sumatra Barat	35,6	53,6	48,6
Riau	44,2	60,0	54,2
Jambi	40,4	62,6	57,3
Sumatra Selatan	41,3	64,0	56,6
Bengkulu	40,3	66,9	60,2
Lampung	44,1	61,5	59,0
DKI Jakarta	52,3	-	52,3
Jawa Barat	65,5	53,4	51,6
Jawa Tengah	52,0	64,3	60,6
DIY	44,7	69,9	56,7
Jawa Timur	49,7	60,3	56,9
Bali	52,7	68,1	63,2
NTB	42,1	65,4	60,3
NTT	35,7	73,6	67,7
Timor-Timur	43,5	61,7	60,2
Kalimantan Barat	43,7	72,4	65,7
Kalimantan Tengah	41,5	65,4	60,4
Kalimantan Selatan	42,0	35,3	60,0
Kalimantan Timur	43,3	63,2	55,3
Sulawesi Utara	43,9	56,0	52,9
Sulawesi Tengah	36,6	60,9	35,4
Sulawesi Selatan	36,3	47,7	44,3
Sulawesi Tenggara	35,4	35,4	53,1
Maluku	38,5	54,9	50,3
Irian Jaya	44,3	70,1	62,3
Indonesia	47,7	60,2	55,7

Sumber: BPS, 1992, diolah kembali.

sekarang ataukah dapat tegar berdiri melawan arus tersebut dan pada kelanjutannya berhasil lolos sebagai penggerak utama perubahan sosial (Tjiptoherijanto, 1989).

- Pemanfaatan Pekerja

Pada pendekatan *labor force approach*, angkatan kerja terdiri dari dua kelompok: angkatan yang bekerja atau pekerja dan pencari kerja atau penganggur. Untuk yang kedua ini selanjutnya menjadi ukuran pengangguran terbuka dengan berbagai kelemahan seperti telah

dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih menjelaskan kelompok pekerja, Hauser (1974) mengembangkan pendekatan lain yang disebut *labor utilization*, yaitu kelompok angkatan kerja dibagi atas lima kategori.

1. Kurang dimanfaatkan karena tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, tetapi berusaha mencari pekerjaan.
2. Kurang dimanfaatkan karena jumlah jam kerja kurang dari jumlah jam kerja normal.
3. Kurang dimanfaatkan karena penghasilan yang diperoleh lebih rendah daripada penghasilan minimal yang cukup untuk hidup layak.
4. Kurang dimanfaatkan karena pekerja terpaksa melakukan pekerjaan yang jauh lebih rendah daripada kemampuannya yang sebenarnya, diukur berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki.
5. Pekerja yang benar-benar telah dimanfaatkan secara penuh, baik ditinjau dari jam kerja, penghasilan, maupun tingkat pendidikan.

Dari kategori di atas hanya data jam kerja yang dikumpulkan pada Sensus Penduduk 1990. Oleh sebab itu, analisis yang dimaksud dengan pemanfaatan pekerja pada bagian ini hanya berdasarkan jam kerja. Analisis jam kerja pada bagian ini mengacu pada konsep yang biasa dipakai yaitu 35 jam per minggu sebagai batasan jam kerja normal (BPS, 1992).

Dari 26.411.074 pemuda yang bekerja, masih sebanyak 33,2 persen bekerja kurang dari jam kerja normal (35 jam per minggu), terdiri atas 18,5 persen bekerja antara 1-24 jam per

minggu dan 14,7 persen antara 25-34 jam per minggu. Mereka yang bekerja di atas jam kerja normal (35-44 jam) sebanyak 26,1 persen, dan 38,3 persen bekerja 45 jam atau lebih, atau secara keseluruhan mencapai 64,4 persen. Kelompok yang sementara tidak bekerja sangat kecil, hanya 2,4 persen.

Apabila tingkat pemanfaatan ini dibedakan antara daerah kota dan desa, secara keseluruhan tingkat pemanfaatan di atas normal di daerah kota mencapai 82,6 persen, sementara di pedesaan lebih rendah, yaitu 57,2 persen. Kalau dihubungkan dengan besarnya angka pengangguran terbuka, di desa lebih kecil daripada di daerah kota. Ini yang sering menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka "menyesatkan". Meskipun angka pengangguran kecil, ternyata tingkat pemanfaatan juga lebih kecil. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebiasaan "membagi pekerjaan di desa", jadi meskipun bekerja, tetapi jam kerja pendek. Sebenarnya yang menjadi masalah pokok ketenagakerjaan di Indonesia dan di negara-negara berkembang pada umumnya adalah rendahnya produktivitas pekerja yang tercermin pada penghasilan pekerja yang rendah, jam kerja yang tidak stabil, dan ketidakserasian antara pekerjaan yang harus dilakukan dengan tingkat pendidikan pekerja (Manning, 1984). Kondisi ini merupakan gejala pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal.

- Struktur Pekerjaan

Analisis mengenai struktur pekerjaan biasanya menitikberatkan

pada alokasi kerja menurut sektor, kecenderungan perpindahan dari sektor pertanian ke sektor lain, dan penyebab perpindahan tersebut. Perpindahan angkatan kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dicermati oleh para ekonom untuk menghitung peningkatan produktivitas dan pendapatan pekerja (Kuznets, 1966).

Analisis struktur pekerjaan pada umumnya dibedakan menjadi tiga: lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.

Pembagian struktur pekerjaan, berdasarkan lapangan pekerjaan dibedakan menjadi tiga sektor: sektor A (*agriculture* atau pertanian), sektor M (*manufacture* atau pertambangan, industri, bangunan, listrik, dan air), dan sektor S (*service* atau pengangkutan dan perhubungan, perdagangan, dan jasa). Menurut teori ekonomi, proses pembangunan biasanya disertai dengan perpindahan angkatan kerja dari sektor A ke sektor M dan S. Keberhasilan strategi pembangunan sering dikaitkan dengan kecepatan pertumbuhan sektor M yang dianggap berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas angkatan kerja (Manning, 1984).

Seperti terlihat pada Tabel 10 masih lebih dari separo (52,8 persen) pemuda Indonesia bekerja di sektor tradisional atau sektor pertanian. Kondisi ini belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan pembangunan. Menurut teori-teori ekonomi keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain ditandai dengan proporsi yang tinggi dari angkatan kerja yang bekerja di sektor manufaktur dan sektor jasa.

Tabel 10.
Struktur Pekerjaan Pemuda, 1990

Struktur Pekerjaan	Jumlah	Persentase
i. Berdasarkan Lapangan Pekerjaan		
Sektor Pertanian	13.945.048	52,8
Sektor Manufaktur	4.701.171	17,8
Sektor Jasa	7.734.855	29,4
Jumlah	26.411.074	100,0
ii. Berdasarkan Jenis Pekerjaan		
Tenaga Ahli	977.210	3,7
Setengah Ahli	1.346.965	5,1
Tenaga Kasar	24.086.899	91,2
Jumlah	26.411.074	100,0
iii. Berdasarkan Status Pekerjaan		
Sektor Informal	17.193.609	65,1
Sektor Formal	9.217.465	34,9
Jumlah	20.411.074	100,0

Sumber: BPS, 1994, diolah kembali.

Berdasarkan jenis pekerjaan angkatan kerja yang bekerja dapat digolongkan menjadi tiga yaitu "tenaga ahli" yang terdiri atas tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya; "setengah ahli" terdiri atas tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan serta tenaga tata usaha dan yang sejenisnya; serta "tenaga kasar" meliputi tenaga penjualan, usaha jasa, usaha pertanian, produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar. Dengan tiga golongan ini Sensus Penduduk 1990 memperlihatkan bahwa hanya 3,7 persen pemuda Indonesia termasuk tenaga ahli, 5,1 persen setengah ahli, dan sisanya 91,2 persen termasuk tenaga kasar (Tabel 10).

Analisis berdasarkan status pekerjaan dapat digolongkan menjadi dua: sektor informal dan sektor formal.

Sektor informal terdiri atas berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap, serta pekerja keluarga. Sektor formal terdiri atas kelompok berusaha dengan buruh tetap dan buruh/karyawan. Seperti terlihat pada Tabel 10 sekitar dua pertiga dari pemuda Indonesia masih bekerja di sektor informal. Seperti diketahui ciri umum dari sektor ini adalah dapat menyerap pekerja yang banyak, jam kerja panjang, dan pendapatan rendah.

Kesimpulan

Dilihat dari karakteristik demografi, sosial dan ekonomi, kondisi pemuda Indonesia kurang menguntungkan. Dari aspek demografi ditandai dengan laju pertumbuhan dan tingkat fertilitas

yang tinggi, dari aspek sosial ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan dari aspek ekonomi ditandai dengan tingkat pengangguran pemuda yang tinggi serta struktur pekerjaan yang kurang menguntungkan. Dilihat dari lapangan pekerjaan sebagian besar di pertanian, dari jenis pekerjaan sebagian besar sebagai tenaga kasar dan dari status pekerjaan sebagian besar bekerja di sektor informal.

Kondisi atau kualitas pemuda seperti diungkapkan di atas adalah

sebagai salah satu akibat yang timbul dari kebijaksanaan kependudukan yang lebih bersifat mempengaruhi variabel demografi daripada menanggapi atau mengantisipasi akibat yang timbul dari perilaku demografi tersebut. Aspek inilah yang seharusnya juga diperhitungkan sejak awal. Dua aspek yang sangat penting adalah pendidikan dan kesempatan kerja. Perlu diciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, ed. 1974. *Pemuda dan perubahan sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Arndt, R. W. dan Sundrum. 1983. "Kesempatan kerja", dalam R.W. Arndt., ed., *Pembangunan dan pemerataan: Indonesia di masa orde baru*. Jakarta: LP3ES.
- Biro Pusat Statistik. 1983. *Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 1980*. Jakarta.
- 1992. *Penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- 1994. *Profil kependudukan Indonesia*. Jakarta.
- Effendi, Sofian, Tri Sucipto, Tukiran dan Budi Puspo Priyadi. 1990. *Studi implikasi sosial peledakan penduduk usia muda*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Effendi, Sofian. 1991. "Kebijaksanaan pengembangan sumber daya manusia menghadapi era tinggal landas", *Populasi*, 1(2): 1-10.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1992. "Sumber daya manusia di Indonesia analisis data sensus", *Populasi*, 3(1): 13-28.
- Gold, Thimas B. 1988. *Taiwan miracle*. New York: Sharpo.
- Hauser, P. 1974. "The measurement of labour utilization", *Malayan Economic Review*, 19(1).
- Kuznets, S. 1966. *Modern economic growth: rate structure and spread*. New Haven: Yale University Press.
- Manning, Chris dan Mikhael Papayungan. 1984. *Analisis ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik dan Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Mubyarto. 1988. "Strategi pembangunan ekonomi menuju perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi tinggi", makalah disampaikan pada Seminar *Peranan Penelitian bagi Pengembangan Sumber Daya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta 17 Desember 1988.

- Myrdal, Gunnar. 1968. *Asian drama: an inquiry into the poverty of nations*. New York: Vintage Books a Division of Random House.
- Psacharopoulos, G. dan K. Hinchliffe. 1980. "Return to education: an international comparison", *World Development Report*. Vol. 8.
- Schultz, T. W. 1962. Reflection on investment in man", *The Journal of Political Economy*. 70(5).
- Sukamdi, 1992. "Pengangguran dan setengah pengangguran golongan terdidik", *Prospektif*. 2-3(4): 229-241.
- Tjiptoherijanto, Priyono. 1989. *Untaian pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- United Nations Children's Fund. 1992. *Situasi anak-anak di dunia*. Jakarta.